

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional dapat diukur dari kemampuan bangsa itu sendiri dalam menyejahterakan rakyatnya. Karena secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pembangunan diharapkan semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu penyelenggaraan negara yang baik juga didukung oleh lengkapnya fasilitas negara sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). Demi terealisasinya pembangunan nasional tersebut sudah barang tentu akan membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup besar agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri (2005: 47) mengatakan bahwa dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai dua sektor pendapatan dalam negeri yang selama ini menjadi andalan yaitu sektor Minyak dan Gas (Migas) serta Non Minyak dan Gas (non Migas). Dari sektor Migas Indonesia mendapatkan pemasukan dari Minyak Bumi dan Gas Alam. Sedangkan dari sektor non Migas Indonesia mendapatkan pemasukan dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)
3. Pajak Bumi Bangunan (PBB)

#### 4. Pajak Perdagangan Internasional:

- a. Bea Masuk
- b. Pajak Ekspor

#### 5. Cukai

#### 6. Pajak Lainnya

#### 7. Penerimaan Bukan Pajak

#### 8. Laba Bersih Minyak

Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta menjadi sumber utama penerimaan negara untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun dalam kenyataannya penerimaan pada sektor migas sering mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional.

Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu menjadi sumber utama dalam membiayai pembangunan nasional. Sedangkan penerimaan dari sektor migas yang dahulu selalu menjadi andalan penerimaan negara, sekarang sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai andalan sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri.

Mengingat pajak memegang peranan penting dalam penerimaan negara, maka dari itu pemerintah terus menyempurnakan sistem perpajakan. Misalnya pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan atau pengelola pajak juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak ini juga dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Hasil pemungutan

pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN.

Walaupun demikian pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian untuk dapat merealisasikan pembangunan nasional tersebut, mengingat biaya dan waktu yang dibutuhkan cukup besar. Oleh sebab itu pemerintah pusat membagi pekerjaannya kepada pemerintahan daerah melalui otonomi daerah yang menjadi program pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (Good Governance) di daerah. Artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel.

Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Pembangunan daerah melalui otonomi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperbanyak pilihan-pilihan yang dapat dilakukan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil, Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penetapan Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom merupakan tonggak diteruskannya urusan-urusan pemerintahan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan urusan pemerintahan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pembangunan daerahnya melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu (Mardiasmo, 2002 : 59) :

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan daerah otonom, tentunya juga harus berusaha sendiri untuk mencari sumber pemasukan daerah agar dapat merealisasikan program pembangunannya. Sebagaimana dengan kabupaten-kabupaten lain, Kabupaten Rokan Hulu juga mengandalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pemasukannya. Diantara Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu, pendapatan dari sektor pajak daerah merupakan salah satu yang paling diandalkan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai sumber pemasukannya karena dinilai sangat potensial. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mieral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Air Tanah
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi andalan pendapatan Kabupaten Rokan Hulu yaitu pajak restoran. Dilihat dari data yang penulis peroleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

bahwa pajak restoran memiliki peran yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Di bawah ini adalah daftar nama-nama restoran dan rumah makan yang menjadi objek pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama-nama Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Nama Restoran/Rumah Makan	No	Nama Restoran/Rumah Makan
1	Sate Kambing Surabaya	114	Soto Ayam Nusantara
2	RM. H. Alung	115	RM. Bareh Solok
3	Warung Nasi Goreng LERENS	116	ABG Wong Solo
4	RM. Sahabat Kita I	117	Bakso Lumajang
5	RM. Uda Sayang	118	RM. Alam Raya
6	RM. Arai Pinang	119	Ampera Uniang
7	RM. Pagi Sore I	120	Miso KIKI
8	RM. Adinda	121	RM. Nasi Kapau
9	RM. Putra Rohul/Harau	122	RM. Brunai Darussalam
10	RM. Palano Indah	123	RM. Tabek Gadang
11	Ampera Sumbari	124	CFC
12	Warung Sate Kambing Bude	125	RM. Nasi Kapau
13	RM. Dua Putra	126	Warung Nasi Sudi Mampir
14	Warung Ummi	127	Warkop Bukit Lawang Indah
15	Warung Lenggo	128	Bakso Mas Edi
16	RM. Ampera Saiyo I	129	RM. Eva
17	RM. Sahabat Alam	130	RM. Emi Minang
18	RM. Selera Bersama I	131	RM. Pagaruyung
19	Warung Embun Pagi I	132	RM. Astuti
20	Warung Embun Pagi II	133	RM. Uni
21	RM. Intan	134	RM. Pariaman Indah
22	Bakso Sari Rasa	135	RM. Selera Bersama 3
23	RM. Tiga Putra	136	RM. Ampera Baru
24	Bakso Ojo Lali	137	RM. Dua Putri
25	RM. Nasi Kapau	138	Warkop Amanah
26	Martabak Mesir Kubang	139	RM. Kakak Adik
27	RM. Bayu Caesa	140	RM. Ampera Baru
28	Bakso Sumber Rasa	141	Cafe Shinta
29	RM. Angek Posom	142	RM. Yabana
30	RM. Indak Diaso	143	Warung Bakso Barokah
31	Bakso Kepala Sapi	144	Ampera Masakan Padang
32	Bofet Merry	145	Sate Madura
33	RM. Usaha Baru	146	Bakso Margo Raso
34	RM. Arafah	147	RM. Yuda Asahan
35	RM. Sederhana	148	RM. Kamang Jaya
36	RM. Saiyo	149	RM. Jufri
37	Sate Awal	150	RM. Urang Melayu
38	RM. Uda Sayang II	151	RM. Putra Tambusai



39	Martabak Rangkuti	152	RM. 5000
40	RM. Mandailing	153	RM. Putra Tunggal
41	Bakso Tennis	154	Martabak Mesir
42	RM. Sahabat Kita II	155	RM. Minang Saiyo
43	Warung Soto Sahabat	156	RM. Ocu
44	Ampera Kamiko	157	RM. Kediri
45	Warung Bunda	158	RM. Kamang Jaya
46	RCC Rohul	159	RM. Kamang Jaya Raya
47	RM. Bintang Rohul	160	Mie Ayam Jumbo
48	RM. Ampera Saiyo II	161	RM. Minang Maimbau
49	RM. Anda	162	RM. Mira
50	R M. Selera Bersama II	163	Mie Ayam Mawar
51	RM. Lestari	164	RM. Ravi
52	Pondok Ikan Bakar Sasmita	165	RM. Takana Juo
53	Ikan Bakar Sahabat Wirda	166	Pondok Lesehan Aneka Putra
54	Pondok Lesehan Mitra	167	RM. Sumatra
55	RM. Ayu	168	Nasi Uduk Amelia
56	Cafe TOM YAM	169	Pondok Kuala Ganda
57	RM. Pagi Sore II	170	RM. Minang
58	Ayam Bakar Urat Solo	171	RM. Sahabat Minang
59	Soto Medan	172	RM. Ira
60	RM. Suka Ramai	173	Bakso Gajah Mungkur
61	RM. Arsifah	174	RM. Reski
62	Warung Kopi	175	RM. Sederhana
63	RM. Widya	176	Bakso Ari
64	Bofet Goyang Lidah	177	Bakso Maju Lancar
65	RM. Takana Juo	178	Ampera Padang
66	RM. Salero Bundo	179	RM. Ampera Padang
67	RM. Damai	180	RM. Numan Ardath
68	RM. Padang	181	RM. Harau Wisata
69	Kedai Mbak Yuni	182	RM. Kelok Indah
70	Nasi Uduk Berkah Ibu	183	Ampera Keluarga
71	Nasi Uduk Maju Lancar II	184	Ampera Mak Aciak
72	Mie Ayam Solo	185	RM. Winda Lestari
73	Nasi Uduk Berkah Mulia I	186	Mutiara Tandun
74	Nasi Uduk Fadhillah Surabaya	187	Ampera H. Masri
75	Nasi Uduk Barokah	188	RM. Kelok Indah 3
76	Nasi Uduk Lumintu	189	SK. Sudi Moro/Mampir
77	Nasi Goreng Tiga Saudara	190	RM. Ilham
78	Sate Madura I	191	RM. Cahaya Minang
79	Nasi Uduk Lamongan	192	RM. Minang Sari
80	Nasi Uduk Maju Lancar I	193	RM. Pariaman Indah
81	Nasi Goreng Sahabat Kita	194	RM. Toni
82	Nasi Uduk Permata	195	Bakso Mie Ayam Ardi
83	Mie Surabaya	196	RM. GONRAYA
84	Buffet Dua Putra	197	RM. Risma
85	Sate Madura II	198	RM. Yana Yani
86	Bakso Buk Yuni	199	RM. Sri Rezeki
87	Nasi Uduk Dewi	200	RM. Mutiara Tandun
88	Serasi Rohul	201	Ampera Ajo
89	Nasi Uduk Fadilah Musik	202	RM. Putri Pagar
90	Sate Mamak	203	RM. Ampera Ajo
91	SK. Maria Ulfah	204	RM. Pariaman

92	RM. Putra Minang	205	RM. Ida
93	RM. Sederhana	206	Kedai Mbak Sari
94	RM. Bahagia	207	RM. Danau Ombak
95	RM. GONRAYA	208	RM. Mutiara Baru
96	Ampera Ajo	209	RM. Pariaman Indah
97	RM. Bang Ali	210	RM. Pariaman Laweh
98	RM. Barokah	211	Bakso Putra Solo
99	Bakso Riski	212	Mie Ayam Bakso
100	Bakso Riski	213	RM. Ampera Ajo
101	RM. Chamfium	214	Bakso Wonogiri
102	RM. Minang Jaya	215	RM. Yeni
103	RM. Upik	216	RM. Bayu
104	AN. Chaira	217	RM. Linda Jaya
105	RM. Restu	218	Sate Madura
106	RM. Batuka Raso	219	RM. Sudi Mampir
107	Bakso Dimas	220	Bakso Lumajang
108	RM. Sahabat	221	Sate Riski
109	Bakso Suroso	222	Bakso Mas Edi
110	Ampera Ayu	223	Masakan Padang
111	RM. Ranah Minang	224	RM. Ampera Uni
112	RM. Rb anah Minang Menanti	225	RM. Sungai Kuning
113	Cafe Pelita Pantai		

*Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah restoran dan rumah makan yang menjadi objek pajak restoran di Kabupten Rokan Hulu yaitu sebanyak 225 buah yang tersebar di sebelas kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun sebanyak 90 objek pajak tersebar di Kecamatan Rambah, 35 buah tersebar di Kecamatan Ujung Batu, 9 buah tersebar di Kecamatan Rambah Samo, 13 buah tersebar di Kecamatan Rambah Hilir, 5 buah tersebar di Kecamatan Tambusai, 23 buah tersebar di Kecamatan Tambusai Utara, 12 buah tersebar di Kecamatan Kabun, 14 buah di Kecamatan Tandun, 13 buah tersebar di Kecamatan Kunto Darussalam, 2 di Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan 9 buah tersebar di Kecamatan Kepenuhan.

Target penerimaan pajak restoran merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap setiap wajib pajak pengusaha restoran

atau badan yang menyelenggarakan usaha, yakni sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dimaksudkan untuk menggalang sumber pendapatan daerah demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Realisasi pendapatan dari sektor pajak restoran yang diterima oleh Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2008 hingga tahun 2012 selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Rokan Hulu**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2008	400.000.000	600.080.273	150%
2009	500.000.000	822.133.378	164%
2010	550.000.000	933.948.391	169,81%
2011	575.000.000	1.249.416.245	217,29%
2012	775.000.000	1.500.250.261	193,58%

*Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu*

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2008 hingga tahun 2012 selalu meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak restoran sebesar Rp 400.000.000 dan total pajak yang diterima yaitu sebesar Rp 600.080.273 atau sekitar 150% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu meningkatkan target penerimaan pajak restoran menjadi Rp 500.000.000 dan realisasi pajak yang diterima yaitu sebesar Rp 822.133.378 atau sekitar 164%

dari target. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kembali menaikkan target penerimaan pajak restoran menjadi Rp 550.000.000 dan penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 933.948.391 atau sekitar 169,81% dari besarnya target yang ditetapkan. Bahkan realisasi target pendapatan pajak restoran pada tahun 2011 mampu mencapai dua kali lipat dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target sebesar Rp 575.000.000 dan realisasi pajak restoran yang diterima sebesar Rp 1.249.416.245 atau sekitar 217,29% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 penerimaan pajak restoran juga mengalami peningkatan yaitu Rp 1.500.250.261 dengan target penerimaan yaitu sebesar Rp 775.000.000,-

Walaupun bukan merupakan pendapatan pajak yang terbesar, namun persentase realisasi pajak restoran merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pajak daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Table 1.3 menunjukkan bahwa persentase realisasi pajak restoran merupakan yang terbesar dibandingkan dengan realisasi pajak daerah lainnya. Dengan tingginya pendapatan dari sektor pajak restoran tersebut maka sudah seharusnya penerimaan pajak restoran dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan melakukan pelaksanaan dan pengawasan pemungutan yang baik maka diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga kemungkinan terjadi kebocoran dalam pemungutannya dapat dihindari.

Dari uraian di atas, maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tingginya realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dianggap penting karena hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat meningkatkan lagi pendapatan dari sektor pajak daerah, sehingga dapat memberikan banyak pemasukan sebagai biaya pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROKAN HULU”.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu ditetapkan perumusan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: “Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tingginya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu.”

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah demi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
2. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini tersusun dalam enam bab dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan alat analisis data.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek yang akan diteliti seperti sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi,



serta visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna memperoleh kesimpulan dari pemecahan masalah penelitian.

## **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun bagi objek penelitian agar bisa menjadi lebih baik.